




**PENGADILAN MILITER
I-07 BALIKPAPAN**


IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PENGADILAN MILITER
I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFFUDIN YOES
NO.39 SEPINGGAN
BALIKPAPAN**

 **FAX / TELP :** (0542) 8520024

 **balikpapan@dilmil.org**

 **www.dilmil-balikpapan.go.id**

 **pengadilanmiliterbalikpapan**

 **@Militer07**

 **Pengadilan Militer Bpp**



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/59 /KP.01/KEP/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 3 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13620/P

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : W1-Mil07/59/KP.01/KEP/I/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H.,M.H.
2	Penanggung Jawab	Letkol Sus Erwin Kristiyono, S.H.,M.H.
3	Pengarah	Mayor Chk Tamrin, S.H.
4	Koordinator	Hery Pujiyanto, S.H.
5	Sekretaris	Sri Handajani
6	Anggota	1. Bella Shafira, A.Md.A.B. 2. Rendy Pratama Putra, S.Kom. 3. Muhammad Subky, S.H.
7	Sekretariat	Sugeng Nuraini

W1-Mil07/59/KP.01/KEP/I/2023



Thamrin, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13620/P



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

Balikpapan, 03 Januari 2023

Nomor : W1-Mil07/Und-04/I-07/I/2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. Seluruh Personel Dilmil I-07
Balikpapan
di
Tempat

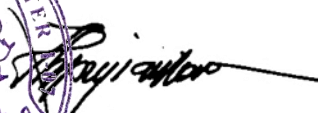
Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2020-2024), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dilmil I-07 Balikpapan
Notulis : PPNPN M.Subky, S.H

Demikian undangan ini disampaikan untuk diketahui mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran bapak/ibu tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Sekretaris


Hery Pujiantono, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087520571



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

NOTULEN RAPAT

- | | | |
|------|--------------------------|---|
| I. | Pelaksanaan Hari/tanggal | : Senin, 09 Januari 2023 |
| | Jam | : 09.00 wita |
| | Tempat | : Ruang Rapat Kantor Dilmil I-07 Balikpapan |
| II. | Pimpinan Rapat | : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan |
| III. | Susunan Acara | : 1. Pembukaan |
| | | 2. Pembahasan Rapat |
| | | 3. Saran/Masukan |
| | | 4. Penutup |

Adapun isi dari Rapat pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 tersebut adalah Pembahasan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara keseluruhan, Terdiri dari :

- I. Review Renstra (Rencana Strategi) 2020-2024
- II. IKU (Indikator Kinerja Utama)
- III. RKT (Rencana Kinerja Tahunan)
- IV. LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
- V. PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan)

I. REVIEW RENSTRA

Terkait penambahan renstra secara umum Kinerja Utama dan Indikator tidak ada perubahan. Hanya saja diperlukan perubahan pada target capaian sehingga di dapat laporan akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi riil didalam instansi pemerintahan. Sehingga laporan lebih akurat dan akuntabel.

Pada rapat ini diperoleh kesepakatan target capaian yang akan dituangkan di dalam Renstra oleh Kepala Pengadilan, Sekretaris, Panitera, dan para Kasubag antara lain:

1. Pada point terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel.
 - a. Presentase sisa perkara pidana dan Lalu Lintas berapa target, realisasi, dan capaian yang telah dicapai setara target atau tidak.
 - Sisa Perkara pidana militer target 95%
 - Sisa perkara pelanggaran lalu lintas target 100%

- b. Persentase Sisa Perkara Pidana dan Lalu Lintas yang telah diselesaikan dicapai setara target atau tidak.
 - Sisa Perkara Pidana yang telah diselesaikan tepat waktu 95, %
 - Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas yang telah diselesaikan 100%
- c. Persentase Sisa Perkara Pidana dan Lalu Lintas yang telah diselesaikan tepat waktu.
 - Sisa Perkara Pidana yang telah diselesaikan tepat waktu Target 95%
 - Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas yang telah diselesaikan tepat waktu Target 100%
- d. Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Target 90% Capaian 95,23%
- e. Persentase perkara yang tidak menggunakan Upaya Hukum Kasasi Target 90% Capaian 91,39%
- f. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Target 95%

II. IKU (Indikator Kinerja Utama)

Di dalam IKU akan dituangkan hasil kesepakatan atas target capaian pada Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

III. RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

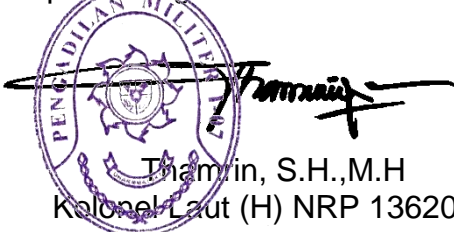
Rencana kerja yang akan dituangkan sebelum ada Renstra Baru terkait Kinerja Utama dan Rencana Kerja Lima Tahunan, Maka Rencana Kerja Tahunan, mengikuti hasil review Renstra.

IV. LKJIP 2022


Laporan Kinerja harus segera diselesaikan sesuai dateline yang diberikan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Sehingga tidak akan mempengaruhi laporan hasil evaluasi terkait ketepatan waktu penyelesaian laporan. Diharapkan bagian-bagian terkait untuk membantu pengumpulan data agar operator dapat segera menyelesaikan pelaporan.

Rapat di selesaikan dan ditutup langsung oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Thamrin, S.H., M.H
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Notulis


Muhammad Subky, S.H



PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp. (0542) 8520025, (0542) 8520026, Fax : (0542) 8520024

ABSENSI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Perihal : Penyusunan Indikator kinerja Utama (IKU)

NO	NAMA NRP / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1	Kolonel Laut (KH) Thamrin, S.H., M.H. 13620/P	Kadilmil		
2	Letnan Kolonel Sus Erwin Kristiyono, S.H., M.H. NRP 527136	Wakadilmil		
3	Mayor Chk Hery Pujiantono, S.H. 2920087520571	Sekretaris		
4	Mayor Chk Tamrin, S.H. 21960347280475	Panitera		
5	Sri Handajani Penata TK I (IIId) 196712261991032002	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan		
6	Bella Shafira, A.Md.A.B. Pengatur (IIc) 199807022022032015	Pengelola Perkara		
7.	Rendy Pratama Putra, S.Kom.	PPNPN		
8.	Muhammad Subky, S.H.	PPNPN		

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Kasubbag Umum dan Keuangan

Puspa Ningsih
Penata Tk. I NIP 196508271987032002



PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN

JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 BALIKPAPAN

E-mail : balikpapan@dilmil.org

Telp. (0542) 8520025, (0542) 8520026, Fax : (0542) 8520024

DOKUMEN KEGIATAN / FOTO KEGIATAN



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara pidana/Kejahatan dan Pelanggaran lalu lintas. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		c. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmi, PM (Penyidik POM) dan Anku sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Papera; Perwira Penyerah Perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Odmit : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer • Ankum : Atasan yang berhak menghukum. 		
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Teroinggirkan	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perakra yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perakra yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan